BAB II

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Tuban saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi Kabupaten selama lima tahun ke depan tentang kebijakan umum sanitasi seluruh wilayah Kabupaten serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi, yang meliputi sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, dan sub sektor drainase lingkungan.

2.1 Visi Misi Sanitasi

Visi misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Tuban. Konsep awal penyusunan kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dicantumkan dalam visi dan misi Sanitasi Kabupaten Tuban, yang diturunkan dari Visi dan Misi Kabupaten Tuban, yaitu :

Tabel 2.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tuban

Visi Kab. Tuban	Misi Kab. Tuban	Visi Sanitasi Kab.Tuban	Misi Sanitasi Kab.Tuban
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religius, sejahtera dan bermartabat dalam tata pemerintahan yang kreatif dan bersih	Meningkatkan sumber daya manusia secara berkeadilan	**Mewujudkan Sanitasi Kabupaten Tuban yang BERSATU (Bersih, Sehat, teratur) dan Partisipatif di Tahun 2018**	**Persampahan:** 1. Peningkatan Cakupan dan Kualitas layanan dalam sistem pengelolaan persampahan berbasis kawasan dan partisipasi masyarakat. 2. Peningkatan jangkauan dan pelayanan sistem pengelolaan persampahan, memberdayakan masyarakat 3. Meningkatkan peran aktif dunia usaha dan swasta
	Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dan kualitas kesejahteraan sosial		**Air Limbah Domestik:** 1. Peningkatan cakupan Layanan dan Kualitas pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Pembangunan Sarana yang berbasis masyarakat berdasarkan tanggap kebutuhan. 2. Mengembangkan system pengelolaan Air Limbah Permukiman yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya air dan lingkungan
	Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing global berbasis pertanian,perdagangan ,industri,pariwisata serta jasa secara berkelanjutan		**Drainase:** 1. Peningkatan Cakupan layanan Drainase melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berwawasan Lingkungan. 2. Membina pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman untuk

			mendukung pencegahan pencemaran lingkungan
	Meningkatkan pengamalan nilai nilai-nilai keagamaan dalam semua aspek kehidupan		**PROHISAN(Promosi Higiene dan Sanitasi)** 1. Peningkatan Pengetahuan, Kesadarandan Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan PHBS Sejak Usia Dini
	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta menumbuhkan wira usaha baru		
	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berdaya guna pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup serta konsisitensi perencanaan tata ruang yang berkelanjutan		
	Meningkatkan kemandirian generasi muda perempuan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak		
	Merevitalisasi proses disentralisasi dan otonomi daerah melalui revormasi birokrasi dan penguatan otonomi desa demi terciptanya tata pemerintahan yang bersih,inovatif,kreatif efisien berbasis pelayanan publik		**AIR BERSIH** 1. Peningkatan cakupan pelayanan/penyediaan air bersih yang berkualitas, sehat, efisien & efektif 2. Pengembangan system penyediaan air bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera
	Meningkatkan kualitas demokrasi yang bermartabat dan bermoral sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia(HAM)		

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

2.2.1 Sub Sektor Air Limbah Domestik

Lembaga utama yang menangani sub sektor Air Limbah Domestik adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan DPU Bidang Kebersihan dan Pertamanan (DPU-BKP) Kabupaten Tuban. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik terutama pengelolaan *grey water* (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-lain) dilakukan oleh masyarakat dan juga dalam pembangunan dan pengelolaan sarana WC umum dan MCK++, Penanganan *black water* (limbah tinja) dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan penanganan sedot tinja, dalam pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Tuban telah memiliki IPAL akan tetapi pemanfaatannya belum optimal.

Pengelolaan air limbah domestik merupakan penjelasan kondisi riil pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Tuban saat ini, terkait kuantitas dan kualitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur lainnya, serta permasalahan prioritas yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik.

Seiring berkembangnya Kabupaten Tuban menjadi Kabupaten industri dan dengan kepadatan penduduk yang semakin bertambah maka berakibat pada meningkatnya volume bahan pencemar khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik air limbah cucian dan kamar madi (*grey water*) dan limbah WC (*black water*), sehingga baik dalam jangka pendek atau menengah maupun jangka panjang diperlukan suatu pengelolaan air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan sanitasi di Kabupaten Tuban.

Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah *on site* maupun *off site*) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/*Center of Business Development* (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan.

Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu:

a. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu fasilitas sanitasi individual seperti *septic tank, jamban dan MCK*
b. Sanitasi sistem *off-site* atau dikenal dengan istilah sistem terpusat atau *sewerage system*, yaitu sistem yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangannya. Peta tersebut terbagi dalam

beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi Kabupaten dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Tuban yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah terpusat (*off site system*).

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

- Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan system setempat (*on site*) dengan skala rumah tangga (*household based*). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini tersebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban. Dalam peta ditandai dengan warna HIJAU MUDA.
- Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah padat penduduk maka pemilihan systemnya adalah system setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga). Zona ini mencakup beberapa kelurahan. Dalam peta ditandai dengan warna HIJAU TUA.
- Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relative tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (*Central Business District/CBD*) yang harus diatasi dengan pilihan system terpusat (*off site*) dalam jangka menengah. Zona ini dalam peta diberi warna COKLAT TUA.
- Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang harus diatasi dengan pilihan system terpusat (*off site*). Zona ini mencakup beberapa Kelurahan Dalam peta diberi warna MERAH MUDA.

Untuk lebih jelas tahapan pengembangan pengelolaan Air limbah domestik *sistem Onsite* dan *sistem Offsite* dapat dilihat pada Peta 2.1

Peta 2.1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem On Site & Off Site

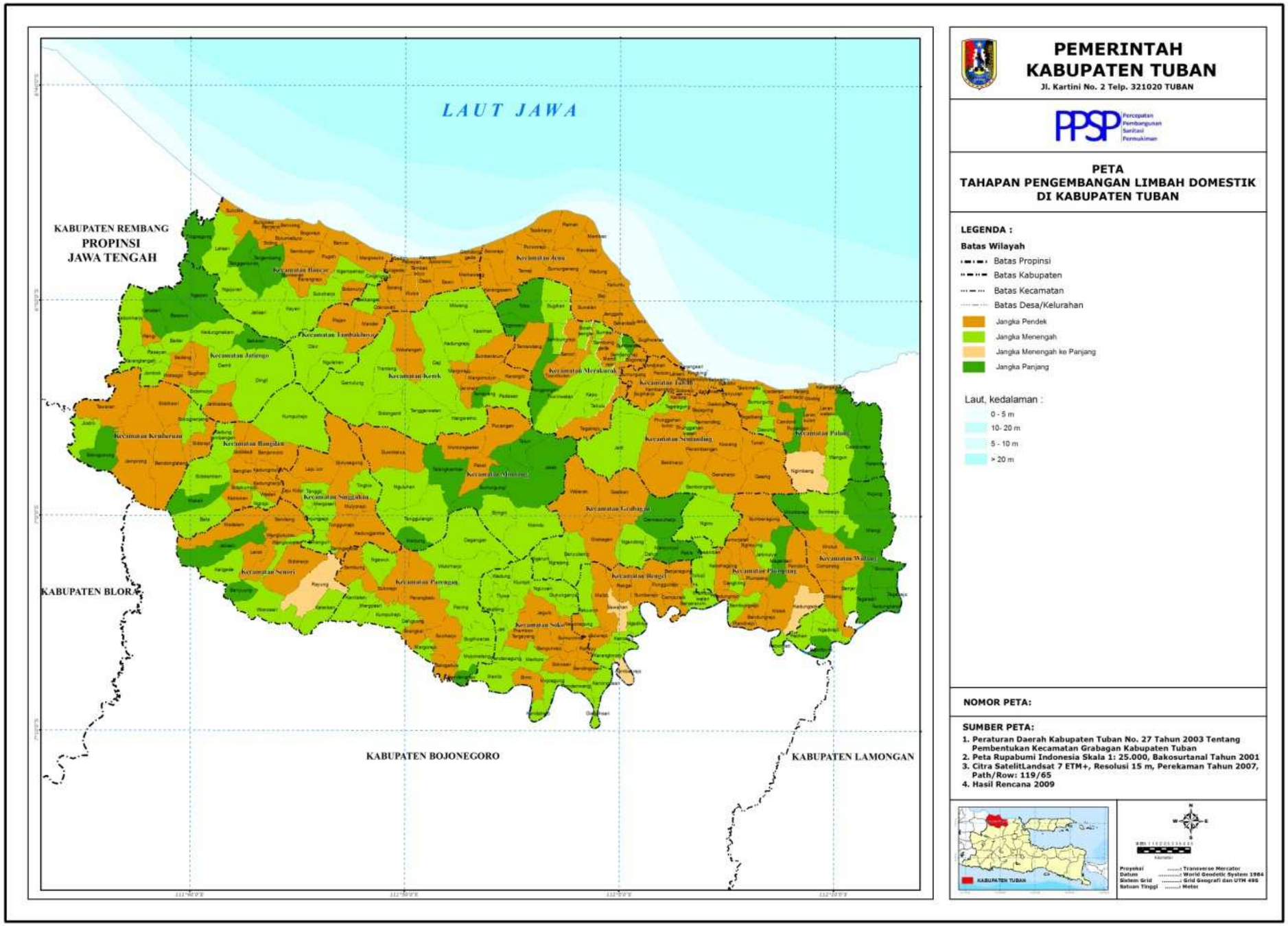

Sumber Peta : RTRW Kab. Tuban 2012-2032 dan Instrument SSK #2 Tahun 2013 (disesuaikan)

Dalam menetapkan system zona penetapan air limbah domestic Pokja sanitasi Kabupaten Tuban mengunakan Diagram Alir Proses sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Penetapan Sistem dan Zona Sub Sektor Air Limbah

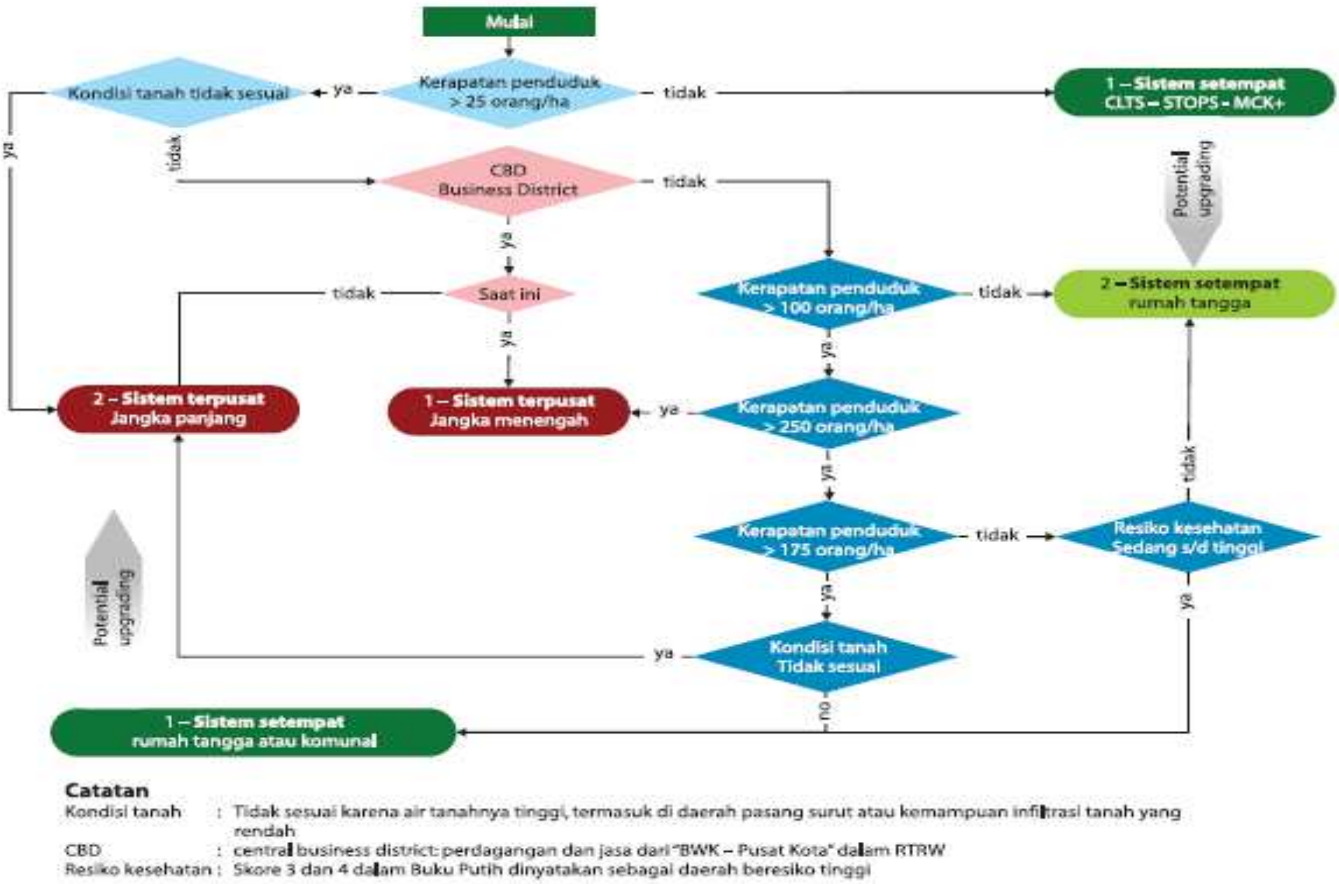

Dari gambar di atas dapat dibagi untuk target cakupan layanan air limbah domestik, yaitu terbagi menjadi 3 yakni jangka pendek, menengah, panjang. Sistem On-Site kondisi exsisting masyarakat yang yang menggunakan tangki septik sejumlah 31% (Hasil Study EHRA) sedangkan yang memakai sistem komunal 6% (sumber data PU 2013), yang mengunakan Off-Site belum di dapatkan pendataan yang konkrit tentang pemakaian sistem ini, sehingga di asumsikan belum ada sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 tentang Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Tuban.

Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Tuban

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Target cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
A	**Sistem On-site**				
1	Individual (tangki septik)	31 % (Study EHRA)	40 %	20 %	10 %
2	Komunal (MCK, MCK++)	10 % (Dinas PU)	40 %	40 %	10 %
B	**Sistem Off-site**				
1	Skala Kota	%	7%	10%	8 %
2	Skala Wilayah	5%	7%	10%	8 %
Jumlah					
C	**Buang Air Besar Sembarangan (BABS)****				
1	Komunal (IPAL)	47 %masih melakukan BABS (Study EHRA)	30 %	10 %	7 %
Jumlah					

Sumber data : Dinas PU Kab. Tuban, Buku Putih Sanitasi & Instrumen SSK 1 (kepadatan penduduk, luas wilayah, serta wilayah kota & komersiil Tahun 2013 & proyeksi Tahun 2018)

Keterangan:

**) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud terhadap total ∑ penduduk*

***) Buang air besar di kebun, kolam, sawah, sungai dll. Termasuk di dalamnya adalah jamban yang tidak memiliki fasilitas pengolahan (dibuang langsung ke lingkungan) atau yang dikenal juga dengan istilah BABS terselubung.*

2.2.2 Sub Sektor Persampahan

Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Tuban, khususnya di kota Tuban telah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari kota ke lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA), dimana dilakukan dengan menggunakan dump truck, amroll truck dengan kapasitas angkut 5-6 ton dan sebagian lainnya dengan menggunakan kendaraan yang lebihkecil (motor sampah) ini dam hal pengumpulan.

TPA Gunung Panggung mengalami rehabilitasi dengan bantuan dana APBN melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan rehabilitasi ini rencananya akan dilaksanakan selama 4 (Empat) tahun berturut-turut. Dengan rehabilitasi ini diharapkan nantinya TPA Gunung Panggung yang semula menerapkan system open dumping yaitu sistem penimbunan sampah terbuka menjadi *controlled landfill system* yaitu sistem open dumping yang diperbaiki/dikontrol atau sistem peralihan antara tehnik open dumping dan sanitary landfill. Pada cara ini, penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbunan sampah yang dipadatkan atau setelah mencapai tahap/periode tertentu, jadi penutupan dengan tanah tidak dilakukan setiap hari tetapi dengan periode waktu yang lebih

panjang. Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan.

Kabupaten Tuban yang terdiri dari 20 kecamatan (328 Desa/Kelurahan) dengan jumlah penduduk 1.181.279 jiwa, dengan luas wilayah 17.601.501 Hektar (Ha), berpotensi setiap harinya menambah jumlah (volume) sampah, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 0,5 Kg perharinya. Jika penduduk Tuban berjumlah 1.181.279 jiwa berarti produksi sampahnya perhari sekitar 590.639 kg atau sekitar 17.719 ton/ bulan. Kapasitas TPA gunung panggung 30 ton/hari setara dengan 900 ton/bulan. Dapat dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola secara arif dan bijaksana, tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan.

Akses pelayanan persampahan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU Kabupaten Tuban baru mencapai 15% dari jumlah penduduk. Khusus untuk Kota Tuban sebagai Ibukota Kabupaten baru terlayani 95% dari total jumlah penduduk perkotaan.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Kabupaten Tuban dalam pengelolaan sampah antara lain ;

1. Banyaknya timbulan sampah. Persoalan sampahan saat ini cukup menyita perhatian, tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat sebagai pemberi andil dalam produksi sampah. Hal ini tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan oleh sampah itu sendiri apabila tidak dikelola. Pemecahan masalah sampah membutuhkan pengelolaan yang komprehensif, menyeluruh, bersinergi dan berkelanjutan *(sustainable)*.
2. Pengumpulan dan pembuangan sampah perkotaan sejak dahulu dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi pelaksanaannya masih bersifat parsial, masih ditangani oleh SKPD terkait, padahal permasalahan tersebut merupakan masalah yag kompleks dan tidak bisa ditangani pada satu segi saja oleh satu pihak tertentu, tetapi harus melihat semua segi permasalahan dan dilakukan pemecahan oleh semua pihak secara bersama pula.
3. Saat ini pengelolaan persampahan hanya menjadi prioritas kedua. Tenaga ahli yang masih kurang, perencanaan dan fungsi pengawasan yang sangat lemah, serta pendanaan yang tidak proporsional membuat pengelolaan persampahan sangat memprihatinkan dan kurang efisien.
4. Pengumpulan yang tidak memadai, dimulai pada tingkat individu masyarakat, rumah tangga, sampai wilayah terkecil, kemudian penanganan akhir dari semua produksi sampah yang ada masih kurang benar dan tidak maksimal, baik sampah perkotaan maupun jenis sampah lainnya. Hal ini dapat mengancam keadaan kesehatan masyarakat sekitar, mengurangi keindahan dan kenyamanan kawasan perkotaan serta menurunkan derajad kebersihan lingkungan.

5. Salah satu masalah utama yang menjadi penghambat dalam pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan adalah biaya pengelolaan yang tinggi, yang diperparah lagi oleh produktivitas yang rendah mengakibatkan beban keuangan yang berat pada pemerintah daerah. Situasi ini, akan semakin diperburuk lagi oleh kurang efektifnya kebijakan dan strategi secara nasional untuk jangka pendek dan panjang dalam pengelolaan persampahan.
6. Melihat anggaran yang bersumber dari APBD II terhadap kegiatan pengelolaan persampahan yang cukup minim, maka sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan.

Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Tuban terdapat 2 dua) zona yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- Zona 1, merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah (5 tahun) ke depan. Seluruh kelurahan dalam zona ini, dalam peta diberi pewarnaan HIJAU.
- Zona 2, merupakan area padat dan kawasan bisnis (*Central Business District/CBD*) yang harus diatasi dengan pilihan system langsung ke TPA dalam jangka waktu pendek. Zona ini mencakup 168 desa/kelurahan,. dalam peta diberi pewarnaan MERAH TUA.
- Zona 3, merupakan area yang harus terlayani dalam jangka menengah dengan sistim layanan tidak lansung dalam petakelurahan/desa tersebut diberi pewarnaan KUNING.
- Zona 4, merupakan area cakupan layanan secukupnya berbasis masyarakat kelurahan/desa yang termasuk dalam zona ini diberi pewarnaan COKLAT.

Peta 2.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

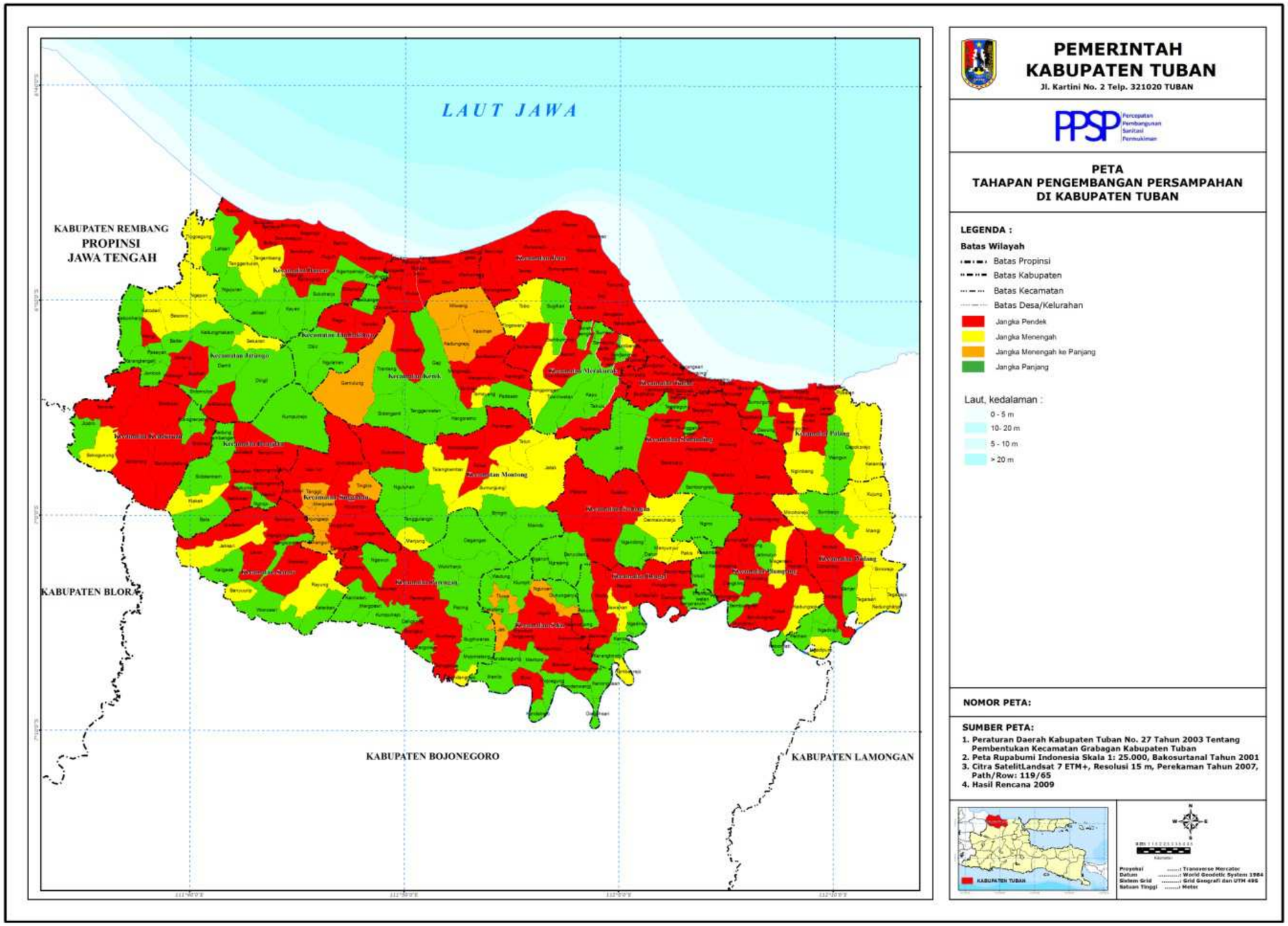

SumberPeta : RTRW Kab. Tuban Tahun 2012-2032 dan Instrument SSK #2 (disesuaikan)

Gambar 2.2.a Diagram Alir Proses Penetapan Sistem dan Zona Sub Sektor Persampahan

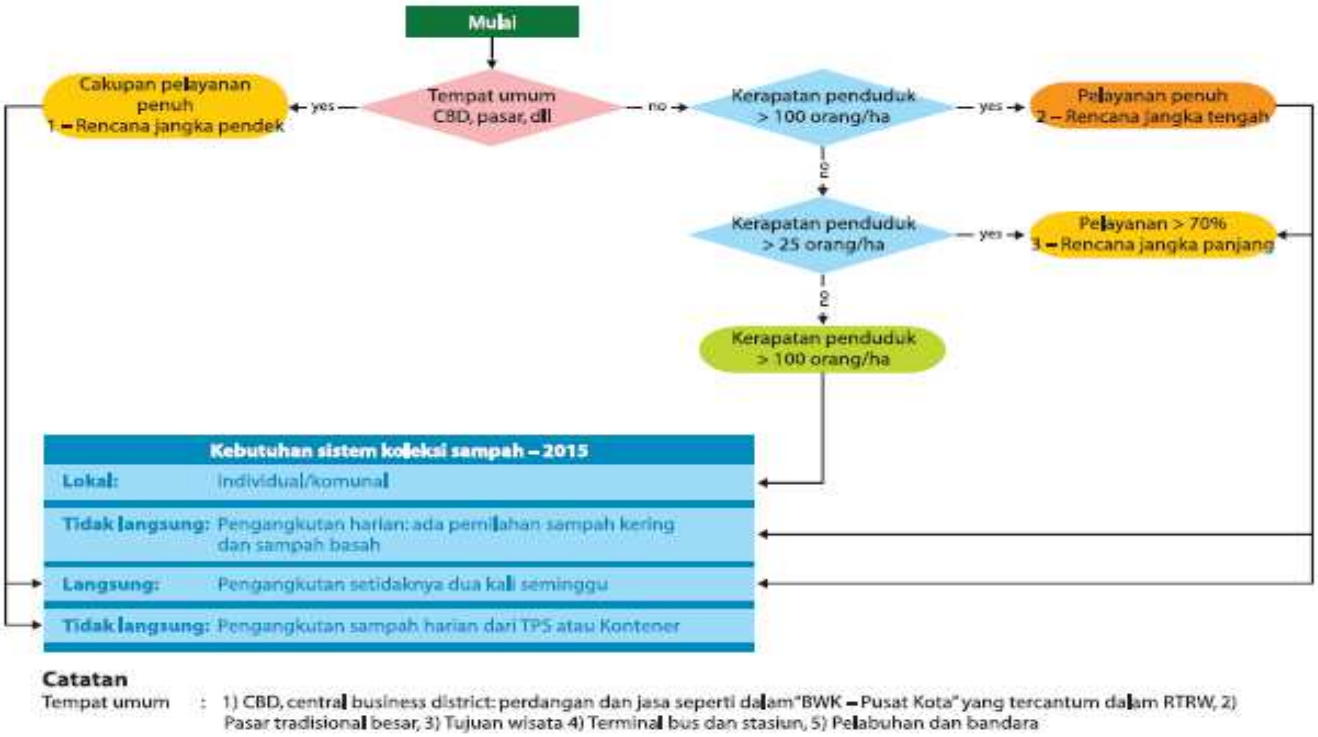

Gambar 2.2.b. Diagram Alir Proses Penetapan Sistem dan Zona Sub Sektor Persampahan

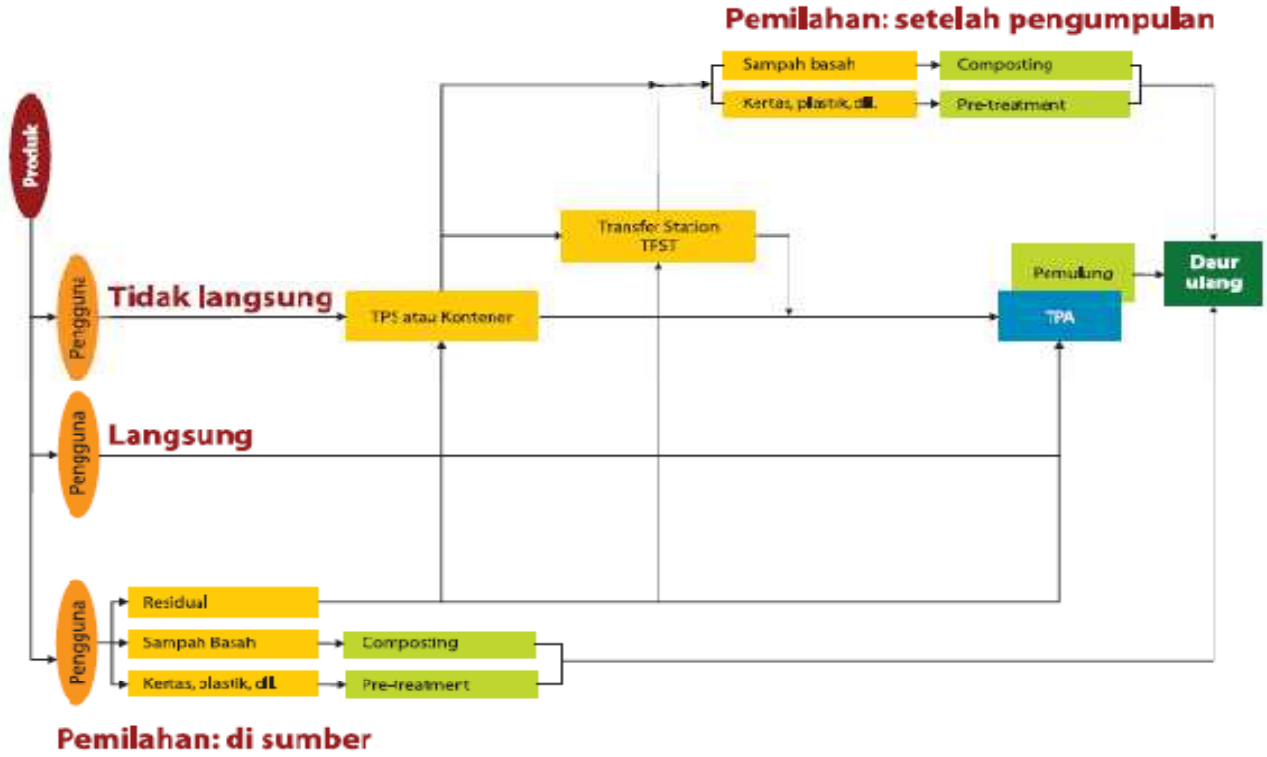

Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Tuban

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
A	**Penanganan langsung (*direct*)**				
1	Kawasan komersial (pasar,terminal, Kota)	**51 %**	**30 %**	**20%**	**20 %**
B	**Penanganan tidak langsung (*indirect*)**				
1	Kawasan pedesaan	Baru13 % melakukan pengolahan sampah Rumah Tangga (study EHRA)	40 %	30%	20 %
C	**Penanganan berbasis masyarakat**				
1	Kawasan pedesaan	Baru13 % melakukan pengolahan sampah RT(study EHRA)	40 %	30%	20 %

Sumber data : Dinas PU Kab. Tuban & Iinstrumen SSK #1(kepadatan penduduk, luas wilayah, wilayah kota&komersiil Tahun 2013 & Proyeksi Tahun 2018)

Keterangan:

**) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total ∑ penduduk*

2.2.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan

Kondisi drainase khususnya di lingkungan perumahan dan permukiman pada beberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengan adanya genangan di beberapa kawasan pada musim hujan. Permasalahan genangan secara umum disebabkan oleh belum memadainya fasilitas saluran drainase, sementara fasilitas saluran yang ada tidak semuanya berfungsi dengan baik, hal ini dikarenakan salah satunya adalah perilaku buang sampah sembarangan oleh sebagan masyarakat, sehingga mengalami sumbatan dan terjadi pengendapan /sedimentasi di saluran.

Lembaga utama yang menangani sub-sektor drainase lingkungan adalah Bidang Permukiman dan Tata Ruang (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban). Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum optimal. Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan

Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang diarahkan untuk menegaskan kewajiban masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan. Kondisi penegakkan hukum / aturan atas masalah tersebut masih belum optimal.

Permasalahan Drainase Lingkungan di wilayah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

- Minimnya penganggaran yang berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana drainase, lemahnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase;
- Pelayanan drainase belum menjangkau ke seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, sistem drainase lingkungan belum tertata dan dikelola dengan baik;
- Kondisi fisik drainase yang tidak layak, sebagian besar saluran drainase yang ada belum permanen, masih berbentuk galian tanah dan sebagian ruas mengalami penyempitan;
- Dukungan media komunikasi khususnya media lokasl dalam sosialisasi sistem sanitasi drainase lingkungan masih sangat rendah.

Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan.

Perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang mencakup beberapa kelurahan, dalam peta diberi warna KUNING DI ARSIR
- Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko relative tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (*Central Business District*/CBD) yang harus diatasi dalam jangka menengah, mencakup beberapa kelurahan, dalam peta diberi warna KUNING DI ARSIR
- Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka pendek harus diatasi. Zona ini mencakup beberapa kelurahan, dalam peta diberi warna MERAH DI ARSIR

Peta tahapan pengembangan drainase dapat di lihat pada Peta 2.3 Tahapan Pengembangan Drainase.

Peta 2.3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase

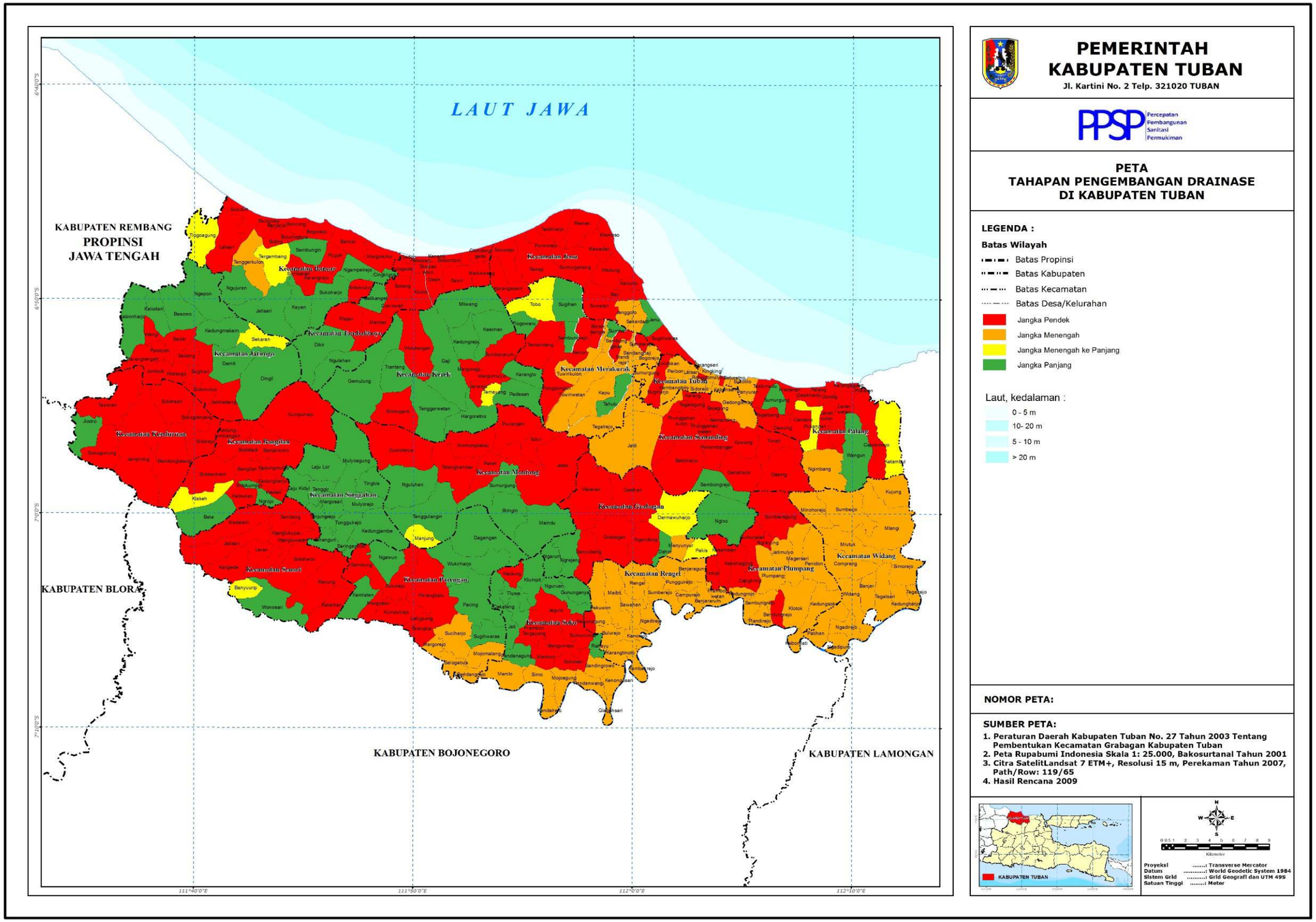

Sumber Peta : RTRW Kab. Tuban Tahun 2012-2032 dan Instrument SSK #2 (disesuaikan)

Gambar 2.3 Diagram Alir Proses Penetapan Sistem dan Zona Sub Sektor Drainase

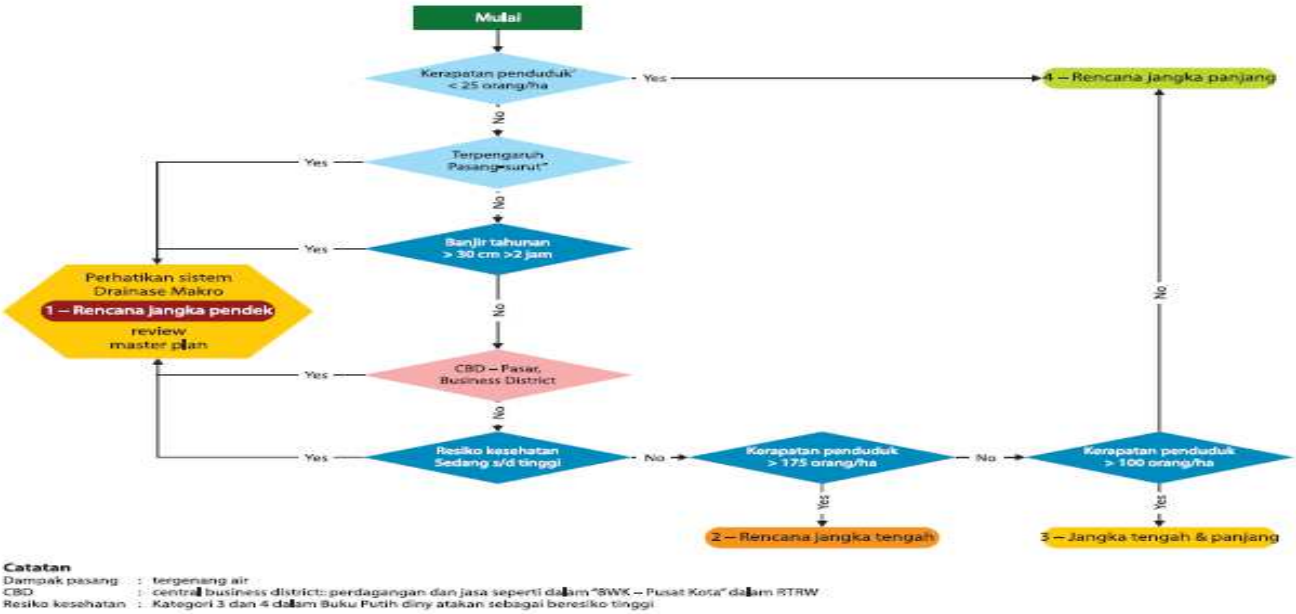

Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Tuban

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Pembangunan Saluran Drainase Terbuka	20 %	40 %	30 %	10%
2	Pembangunan Saluran Drainase Tertutup	20 %	40 %	30 %	10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013

Keterangan:
**) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total ∑ penduduk*

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi

Faktor penting lain yang sangat menentukan dalam penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah faktor pembiayaan, yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan/anggaran daerah. Alokasi pembelanjaan untuk sektor sanitasi di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana rata-rata pertumbuhan pendanaan mencapai 6,3% pertahun. Adapun perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.5 tentang Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD untuk Sanitasi.

Tabel 2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tuban untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	25.486.101.475	23.876.421.530	15.301.412.355	33.161.951.786	37.582.498.900	21,96
1.1	Air Limbah Domestik	565.708.250,00	-	40.580.515	197.500.000	580.000.000	120,09
1.2	Sampah rumah tangga	1.503.922.000	654.510.230	2.899.557.350	3.322.768.705	1.450.000.000	61,19
1.3	Drainase lingkungan	22.272.598.425	13.030.780.900	6.325.930.750	16.449.176.550	18.134.086.000	19,33
1.4	PHBS	247.415.200	1.492.582.750	445.302.075	263.866.831	330.000.000	104,36
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	3.080.000.000	818.700.000	400.000.000	26.028.650	1.279.210.000	1.149
2.1	DAK Sanitasi	2.880.000.000	818.700.000	400.000.000	26.028.650	1.279.210.000	1.149
2.2	DAK Lingkungan Hidup	200.000.000	-	-	-	-	-
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		25.486.101.475	23.876.421.530	15.301.412.340	33.161.951.786	38.287.498.900	22,49
Total Belanja Langsung untuk sanitasi mulai 2012		339.554.989.9625	337.654.289.499	360.273.162.517	528.173.932.195	579.663.177.792	15,62
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		7,51	7,07	4,25	6,28	6,61	1,83
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							6,3 %

Sumber data: Pengolahan data APBD Kab.Tuban untuk belanja Sanitasi selama 5 Tahun

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan pendanaan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Tuban selama periode 2009 – 2013 dengan rata-rata pertumbuhan 6,3% pertahun, maka dapat diperoleh proyeksi pendanaan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yang mencapai besaran sekitar

11,1% ada peningkatan sekitar 4,8% dari alokasi belanja langsung Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 tentang Prakiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan.

Tabel 2.6 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Perkiraan Belanja Langsung (misal OM) operasional & monitoring	670,206,566,163	774,892,831,798	895,931,092,125	1,035,875,528,714	1,197,679,286,300	4,574,585,305,100
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	46,898,357,402.61	57,445,797,982	70,365,357,949	86,190,526,951	105,574,776,463	366,474,816,748
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	42,223,013,668	48,818,248,403	56,443,658,804	65,260,158,309	75,453,795,037	288,198,874,221

Sumber data: SKPD terkait, Pengolahan data APBD Kab.Tuban untuk belanja Sanitasi 5 Tahun

Tabel 2.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tuban untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertum buhan rata-rata
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik	565.708.250	-	40.580.515	197.500.000	580.000.000	120,09
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan *(justified)*	16.672.500	-	-	-	-	-
1.2	Sampah rumah tangga	1.503.922.000	654.510.230	2.899.557.350	3.322.768.705	1.450.000.000	61,19
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan *(justified)*	381.245.400	229.812.450	287.691.500	706.870.000	650.000.000	30,78
1.3	Drainase lingkungan	22.272.598.425	13.030.780.900	6.325.930.750	16.449.176.550	18.134.086.000	19,33
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan *(justified)*	138.361.550	188.646.900	933.936.100	5.054.341.750	2.550.000.000	205,76

Sumber data: SKPD terkait, Pengolahan APBD Kab.Tuban untuk belanja Sanitasi 5 Tahun

Sedangkan analisis terhadap prakiraan pembiayaan operasional pelayanan sanitasi atau pemeliharaan infrastruktur sanitasi 5 tahun ke depan periode Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat

pada Tabel 2.8 tentang Prakiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Tuban untuk Operasional Pemeliharaan Aset Sanitasi.

Tabel 2.8 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Tuban untuk Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2018

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	**Belanja Sanitasi**	**6,094,242,500**	**11,889,629,842**	**23,614,184,686**	**47,477,024,073**	**96,235,075,821**	**185,310,156,922**
1.1	**Air Limbah Domestik**						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan *(justified)*	16,672,500	21,804,296	28,515,658	37,292,777	48,771,494	153,056,724
1.2	**Sampah rumah tangga**						
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan *(justified)*	850,070,000.00	1,111,721,546	1,453,909,438	1,901,422,763	2,486,680,689	7,803,804,436
1.3	**Drainase lingkungan**						
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan *(justified)*	5,227,500,000.00	10,756,104,000	22,131,759,590	45,538,308,533	93,699,623,638	177,353,295,762

Sumber data: SKPD terkait, Pengolahan APBD Kab.Tuban untuk Belanja Sanitasi selama 5 Tahun

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, yang kemudian dibandingkan dengan perkiraan pendanaan operasional/pemeliharaan, diketahui perkiraan ketersediaan atau kemampuan APBD untuk mendanai berbagai program dan kegiatan sanitasi 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi sanitasi, maka diperoleh Tabel 2.9 Prakiraan APBD dalam mendanai Program Kegiatan SSK.

Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tuban dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	**Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan**	6,094,242,500	11,889,629,842	23,614,184,686	47,477,024,073	96,235,075,821	**185,310,156,922**
2	**Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi**	46,898,357,403	57,445,797,982	70,365,357,949	86,190,526,951	105,574,776,463	**366,474,816,748**
3	**Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi**	42,223,013,668	48,818,248,403	56,443,658,804	65,260,158,309	75,453,795,037	**288,198,874,221**
4	**Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)**	40,804,114,903	45,556,168,141	46,751,173,263	38,713,502,878	9,339,700,642	**181,164,659,826**
5	**Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)**	36,128,771,168	36,928,618,562	32,829,474,118	17,783,134,236	20,781,280,784	**102,888,717,300**

Sumber data: Pengolahan APBD Kab.Tuban untuk belanja Sanitasi 5 Tahun